

Katalog: 4101029.72

STATISTIK

KETAHANAN SOSIAL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

2020



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH 2020

ISBN : 978-623-5826-00-4

No. Publikasi : 72000.2131

Katalog : 4101029.72

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : xii + 58 Halaman

Naskah : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Penyunting : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar Kulit : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Diterbitkan Oleh : © BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber Ilustrasi : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Pengarah :

Drs. Simon Sapary M.Sc

Penanggung Jawab :

Mohamad Fadlian Syah, SST, M.Si.

Editor :

Gladius Alfonsus, SST

Penulis :

Ahmad Risal, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

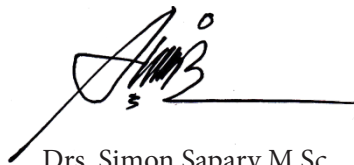
Statistik Ketahanan Sosial merupakan indikator yang mengukur dan menganalisis dampak sosial dari perubahan yang bersifat lintas sektoral. Perubahan tersebut disebabkan karena globalisasi, reformasi dan otonomi daerah. Penyediaan data Statistik Ketahanan Sosial ini akan sangat bermanfaat dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2020 ini menyajikan gambaran yang komprehensif terhadap masalah ketahanan sosial. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan data sekunder dari instansi lain di luar BPS.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Akhirnya kami berharap bahwa buku ini bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam menentukan skala prioritas perencanaan program-program pembangunan.

Palu, November 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. Simon Sapary M.Sc

Daftar Isi

JUDUL	HAL
KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian Statistik Ketahanan Sosial	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Sumber Data	3
BAB 2 STATISTIK KETAHANAN WILAYAH	5
2.1. Sejarah Singkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.2. Wilayah Geografis	7
2.3. Kondisi Lingkungan Hidup	10
BAB 3 STATISTIK KETAHANAN MASYARAKAT	15
3.1. Jumlah, Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk	16
3.2. Rasio Ketergantungan Dan Rasio Jenis Kelamin	18
3.3. Ketenagakerjaan	20
3.4. Pendidikan	26
3.5. Kesehatan	32
3.6. Sosial Budaya	38

Daftar Isi

JUDUL	HAL
BAB 4 STATISTIK KETAHANAN EKONOMI	41
4.1. Inflasi	41
4.2. Pertumbuhan Ekonomi	43
4.3. PDRB	47
4.4. Kemiskinan	49
4.5. Ketahanan Pangan	51
BAB 5 STATISTIK KETAHANAN POLITIK DAN KEAMANAN	53
5.1. Politik	53
5.2. Keamanan dan Ketertiban	56

Daftar Tabel

NOMOR TABEL	JUDUL	HAL
Tabel 1	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/ Kota, 2020	9
Tabel 2	Persentase Rumah Menurut Jenis Atap Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	12
Tabel 3	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum, 2020	13
Tabel 4	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2013-2020	17
Tabel 5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-6, 7-12, 13-15, dan 16-18 Tahun, 2020	27
Tabel 6	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2020	28
Tabel 7	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	29
Tabel 8	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki, 2020	30
Tabel 9	Beberapa Indikator Kesehatan & Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019 – 2020	33
Tabel 10	Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan, 2019-2020	34

Daftar Tabel

NOMOR TABEL	JUDUL	HAL
Tabel 11	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	36
Tabel 12	Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019 – 2020	37
Tabel 13	Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2020	46
Tabel 14	PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2020	48
Tabel 15	Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	55
Tabel 16	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Jumlah Kejahatan yang terselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2020	57
Tabel 17	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	58

Daftar Gambar

NOMOR GAMBAR	JUDUL	HAL
Gambar 1	Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	19
Gambar 2	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Sulawesi Tengah, Agustus 2019 - Agustus 2020 (Ribu Jiwa)	21
Gambar 3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah, Agustus 2019 - Agustus 2020	23
Gambar 4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah Menurut Tempat Tinggal, Agustus 2019 - Agustus 2020	24
Gambar 5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Sulawesi Tengah Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2019 - Agustus 2020	25
Gambar 6	Angka Morbiditas Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2020	35
Gambar 7	Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	39
Gambar 8	Laju Inflasi per Bulan Nasional dan Kota Palu (2012=100), 2020	42
Gambar 9	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2020	44
Gambar 10	Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, 2020	50
Gambar 11	Produksi Padi dan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2020	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai respon semakin kompleksnya permasalahan sosial dalam pembangunan nasional, terutama menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung, dibutuhkan informasi berupa data statistik terutama di bidang sosial. Data statistik tersebut akan digunakan untuk menganalisis ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai pengaruh yang mengancam stabilitas dan eksistensinya.

Penyediaan data statistik ketahanan sosial akan sangat bermanfaat bagi para perencana dan pembuat kebijakan dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Krisis multi dimensional yang sedang berlanjut serta pengaruh globalisasi yang terjadi, seperti kemajuan iptek dan perdagangan bebas diyakini mempunyai kontribusi yang berarti pada perubahan perilaku individu, keluarga dan pada gilirannya akan berpengaruh pada kondisi kehidupan masyarakat.

Pengaruh perubahan yang terjadi sedapat mungkin memberikan dampak yang positif pada kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah disepakati dan dianut bersama, atau dengan kata lain masyarakat memiliki ketahanan

yang tangguh dalam menghadapinya. Namun diakui bahwa dalam menyikapi perubahan yang terjadi respon masyarakat berbeda antar kelompok dan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi, lingkungan, wawasan berpikir, kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut perlu diterjemahkan dalam berbagai kegiatan statistik untuk mendapatkan potret ketahanan masyarakat dan trennya dari waktu ke waktu.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2020 ini mencoba menjawab kebutuhan informasi statistik ketahanan sosial yang diperlukan, baik untuk kepentingan Nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/ Kota, terutama pada era pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

1.2. Pengertian Statistik Ketahanan Sosial

Walaupun belum ada kesepakatan tentang definisi yang pasti dari istilah ketahanan sosial, namun sebagai pendekatan, ketahanan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa/masyarakat berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung

membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai suatu fenomena yang dependen, tingkat ketahanan sosial di suatu wilayah tertentu dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai fenomena independen seperti keadaan komunal, sosial dan lingkungannya. Ketahanan sosial suatu wilayah berawal dari ketahanan individu. Sedangkan ketahanan individu, secara kolektif akan menunjukkan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan ketahanan lingkungan.

1.3. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara lebih detail ketahanan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dapat diilustrasikan dari tingkat keamanan, kehidupan politik, kondisi lingkungan hidup dan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Sumber Data

Data primer dan data sekunder digunakan dalam publikasi ini. Data primer yang dikumpulkan oleh BPS diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang digunakan untuk

menghitung tingkat kemiskinan serta *review* dokumen dan media yang digunakan untuk menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI juga diperkaya dengan data *focus group discussion* dan *in-dept interview* untuk memverifikasi data kualitatif dari *review* media. Selain itu diambil juga sumber yang berasal dari berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder berasal dari beberapa institusi seperti Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Stasiun Klimatologi, dan data dari publikasi Statistik Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Tengah.

BAB 2

STATISTIK KETAHANAN WILAYAH

Ketahanan wilayah adalah situasi yang membuat masyarakat di suatu wilayah lentur dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah. Ancaman internal maupun eksternal mencakup ancaman terhadap fisik wilayah/lingkungan fisik, kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Suatu wilayah disebut memiliki ketahanan jika lingkungan fisiknya mendukung, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup baik dan ketahanan sosialnya juga kuat.

2.1. Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi terbesar di pulau Sulawesi adalah Sulawesi Tengah dengan luas daratan 61.841 kilometer persegi dan wilayah laut 189.480 Kilometer persegi, terletak di bagian barat Kepulauan Maluku dan bagian selatan Provinsi Gorontalo. Secara administratif terbagi dalam dua belas kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten

Buol, Kabupaten Parigi Moutong serta Kota Palu. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah 3.054.020 jiwa sesuai Proyeksi Penduduk Tahun 2019.

Karena letaknya yang strategis, pelabuhan–pelabuhannya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal Portugis dan Spanyol lebih dari 500 tahun yang lampau. Pada bulan Januari 1580, pengeliling dunia Sir Francis Drake dengan kapalnya The Golden Hind pernah singgah di salah satu pulau kecil di pantai timur provinsi ini selama sebulan. Meskipun tidak ada catatan sejarah, bukti persinggahan pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol di negeri ini masih ada seperti pada bentuk pakaian masyarakat hingga dewasa ini.

Setelah dikuasai oleh Belanda pada tahun 1905, Sulawesi Tengah dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil dibawah kekuasaan raja-raja yang memiliki kewenangan penuh. Pemerintahan Belanda membagi Sulawesi Tengah menjadi tiga daerah yaitu wilayah barat yang dikenal dengan Kabupaten Donggala dan Buol serta Tolitoli yang berada dibawah kekuasaan Gubernur yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dibagian tengah yang membujur di kawasan timur laut yakni sebagian Donggala dan bagian selatan Poso berada dibawah pengawasan Residen di Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan bagian timur Sulawesi Tengah terdiri atas Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan yang berada dibawah kendali Buton, Sulawesi Tenggara.

Pada Tahun 1919, raja-raja yang masih berkuasa dibawah pemerintahan Belanda menandatangani suatu perjanjian yang disebut Korte Verklaring Renewcame. Perjanjian ini untuk memperbarui

perjanjian mereka dimana seluruh daerah Sulawesi Tengah dipercayakan kepada kekuasaan residen Sulawesi Utara.

Setelah perang dunia II, Provinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi beberapa bagian dan sub-bagian. Pada tanggal 13 April 1964 terbentuk Provinsi Sulawesi Tengah, dan sejak saat itu memiliki pemerintahan sendiri dan hingga kini tanggal 13 April diperingati sebagai lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2. Wilayah Geografis

Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-5 di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatra dengan luas daratan 227.654 km². Bentuk unik menyerupai huruf K yang membujur dari utara ke selatan dan tiga semenanjung yang membujur ke timur laut, timur dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Makassar di bagian barat yang menjadikannya terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan dari Kepulauan Maluku oleh Laut Maluku.

Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 30°48' Lintang Selatan dan antara 119°22'–124°22' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas: Utara-Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo; Selatan-Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; Barat-Selat Makassar; Timur-Provinsi Maluku Utara.

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 61.841 km² yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Luas wilayah laut mencapai 189.480 km². Sulawesi Tengah Terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota.

Hampir semua bagian provinsi ini bergunung-gunung (kira-kira 42,80% di atas ketinggian 500 MDPL) dan puncak tertinggi adalah Gunung Nokilalaki yang mencapai 2.610 MDPL. Selain gunung, Sulawesi Tengah memiliki beberapa sungai diantaranya Sungai Lariang, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu. Juga terdapat danau yang menjadi obyek wisata terkenal yakni Danau Poso dan Danau Lindu.

Sulawesi Tengah memiliki beberapa kawasan konservasi seperti suaka alam, suaka margasatwa dan hutan lindung yang memiliki keunikan flora dan fauna unik sekaligus menjadi obyek penelitian bagi para ilmuwan dan naturalis. Ibukota Sulawesi Tengah adalah Kota Palu yang terletak di Teluk Palu.

Tabel 1 Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota,
2020

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	Salakan	2 488,79
2. Banggai	Luwuk	9 672,70
3. Morowali	Bungku	3 037,04
4. Poso	Poso Kota	7 112,25
5. Donggala	Banawa	4 275,08
6. Tolitoli	Baolan	4 079,77
7. Buol	Biau	4 043,57
8. Parigi Moutong	Parigi	5 089,91
9. Tojo Una-una	Ampana	5 721,15
10. Sigi	Bora	5 196,02
11. Banggai Laut	Banggai	725,67
12. Morowali Utara	Kolonodale	10 004,28
13. Palu	Palu	395,06
Sulawesi Tengah		61 841,29

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian pulau Sumatra, musim hujan di Sulawesi Tengah terjadi antara bulan April dan September sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 milimeter pertahun yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia.

Temperatur berkisar antara 23 sampai 33,6 derajat Celcius untuk dataran dan pantai dengan tingkat kelembaban antara 71% sampai 76%. Di daerah pegunungan suhu dapat mencapai 16 sampai 24 derajat Celcius.

2.3. Kondisi Lingkungan Hidup

Keselarsan pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/ sosial. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Dengan pengertian seperti itu maka informasi lingkungan hidup ke dalam komponen-komponennya yang lebih kecil, serta analisis yang akurat terhadap lingkungan hidup tersebut, akan menjadi sangat

penting. Oleh sebab itu lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan hidup adalah wilayah tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan (tata ruang).

Selain mencermati dari sisi tata ruang, kualitas dan fasilitas perumahan menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya. Pada tahun 2020, 84,32 persen rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Kemudian rumah tangga dengan status mengontrak/sewa 5,61 persen, dan sisanya dengan status lainnya sebesar 10,08 persen.

Atap rumah merupakan salah satu unsur rumah yang sangat vital. Tidak saja berfungsi sebagai pelindung terhadap panas matahari dan hujan, atap rumah menurut jenisnya juga berpengaruh pada kesehatan bagi penghuninya. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 90,51 persen rumah beratapkan seng, kemudian 5,72 persen beratapkan ijuk, dan sisanya beratapkan beton/genteng/dan lainnya.

Tabel 2 Persentase Rumah Menurut Jenis Atap Provinsi Sulawesi Tengah,
2020

Jenis Atap	Persentase
(1)	(2)
1. Beton	0,84
2. Genteng	1,92
3. Kayu/Sirap	0,09
4. Seng	90,51
5. Asbes	0,49
6. Ijuk	5,72
7. Bambu	0,42
8. Lainnya	0,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Fasilitas air bersih merupakan salah satu indikator ketahanan lingkungan. Pada tahun 2020 sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah yang menggunakan Mata Air Terlindung sebesar 17,22 persen sedangkan sisanya menggunakan sumber air leding, pompa, air dalam kemasan, dan lain lain.

Tabel 3 Persentase Penggunaan Sumber Air Minum, 2020

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
1. Air Isi Ulang	39,49
2. Leding	8,43
3. Pompa	14,12
4. Air Dalam Kemasan	1,42
5. Sumur Terlindung	7,25
6. Sumur Tak Terlindung	3,00
7. Mata Air Terlindung	17,22
8. Mata Air Tak Terlindung	2,44
9. Air Permukaan	6,28
10. Air Hujan	0,32
11. Lainnya	0,05

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

BAB 3

STATISTIK KETAHANAN MASYARAKAT

Ketahanan masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ketahanan sosial, karena masyarakat adalah makhluk sosial sehingga interaksi di dalam masyarakat merupakan salah satu proses sosial. Faktor manusia menjadi penentu dalam hal ketahanan sosial, karena manusia bukan saja sebagai obyek atau sasaran namun sekaligus juga sebagai subyek atau pelaksana pembangunan. Dengan demikian kondisi sumber daya manusia menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat sampai seberapa jauh ketahanan sosial bisa dilihat. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia diperlukan karena jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik. Sebaliknya, hanya akan menjadi beban manakala kualitasnya rendah.

3.1. Jumlah, Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.985.734 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak, terdapat di Kabupaten Parigi Moutong dengan penduduk sebesar 440.015 jiwa, kemudian Kota Palu sebesar 373.218 Jiwa, diikuti oleh Kabupaten Banggai sebesar 362.275 Jiwa.

Meskipun dari tahun ke tahun jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan terus bertambah akan tetapi laju pertumbuhan penduduk selama delapan tahun terakhir menunjukkan kecenderungan melambat. Pada Tahun 2013, Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 1,69 persen dan pada Tahun 2020 sebesar 1,22 persen. Seiring bertambahnya jumlah penduduk tersebut, Sulawesi Tengah diprediksikan akan mengalami Bonus Demografi.

Potensi permasalahan jumlah penduduk yang besar dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang dimiliki. Bila jumlah penduduk besar sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan ketahanan wilayah/sosialnya. Oleh karena itu, Sulawesi Tengah sedang menuju ke arah yang lebih baik.

Tabel 4 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah,
2013-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
2013	2 785,49	1,69
2014	2 831,28	1,64
2015	2 876,69	1,60
2016	2 921,72	1,57
2017	2 966,32	1,53
2018	3 010,44	1,49
2019	3 054,02	1,45
2020	2 985,73	1,22

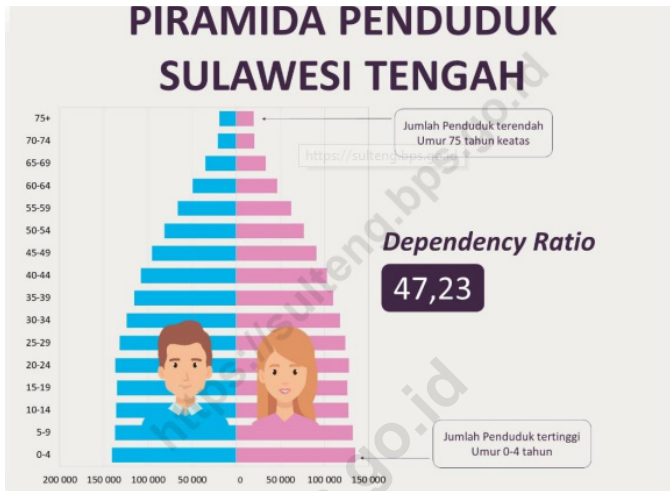
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

3.2. Rasio Ketergantungan Dan Rasio Jenis Kelamin

Selain jumlah, kepadatan maupun pertumbuhan penduduk, hal lain yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, antara lain komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dikatakan penting karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Kelahiran menurut jenis kelamin jelas berbeda, pada saat dilahirkan umumnya jumlah bayi pria lebih banyak dari bayi wanita. Dari kedua variabel tersebut, yaitu umur dan jenis kelamin akan dapat dihitung indikator Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin, dimana kedua indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan wilayah/sosial dari suatu wilayah kota dan atau dalam satu rumahtangga

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antar jumlah penduduk yang produktif (15 – 64 tahun) dengan yang tidak produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas). Rasio Ketergantungan memberikan gambaran seberapa jauh penduduk yang berusia produktif/aktif secara ekonomi harus menanggung penduduk yang belum produktif dan pasca produktif. Untuk penduduk yang mempunyai struktur muda atau sangat tua sekali, maka beban ketergantungannya sangat tinggi. Di negara-negara berkembang karena struktur umur penduduknya muda, maka Rasio Ketergantungan biasanya relatif tinggi.

Gambar 1 Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dilihat dari kelompok umur, penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 terbesar berada pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 276.046 jiwa (9,24%), sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terendah adalah kelompok umur 75 tahun keatas sebanyak 38.492 jiwa (1,29%).

Selain menurut umur, komposisi penduduk juga dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Dari 2.985.734 jiwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020, sebanyak 1.534.706 jiwa diantaranya adalah penduduk laki-laki dan 1.451.028 penduduk perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin yang

merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 105, yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

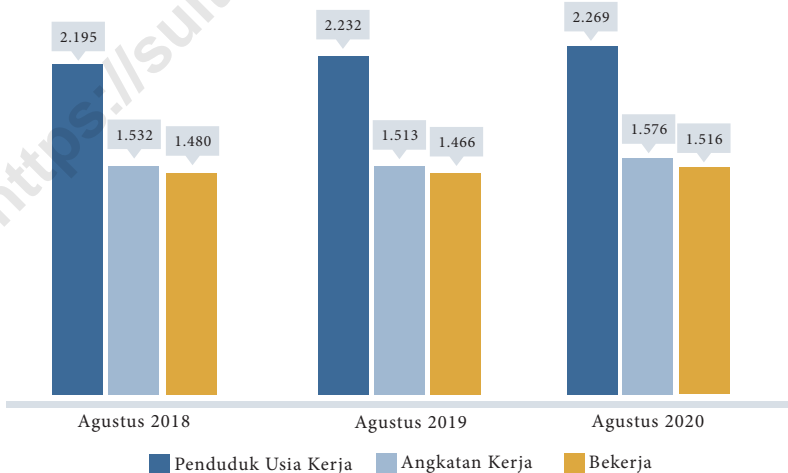
3.3. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan juga merupakan salah satu hal yang mempunyai pengaruh terhadap ketahanan sosial. Misalnya tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah akan memberikan dorongan yang kuat (potensi) bagi munculnya berbagai ketidakpuasan atas beragam kebijakan pembangunan (terutama dibidang ekonomi), yang kemudian dapat memicu terjadinya konflik antar berbagai pihak, baik pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, dan antar masyarakat sendiri. Frekuensi konflik yang timbul dan eskalasinya menunjukkan/mengindikasikan seberapa kuatnya ketahanan wilayah/sosial masyarakat yang ada. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat dianggap paling relevan (terutama bagi indikator penyebab/input) dalam menggambarkan kondisi ketahanan wilayah/sosial, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah bulan Agustus 2020 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari 2.231,72 ribu jiwa pada Agustus 2019 menjadi 2.269,14 ribu jiwa pada Agustus 2020. Kenaikan jumlah penduduk usia kerja, juga diikuti

dengan naiknya jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 62,7 ribu jiwa yaitu dari 1.513,04 ribu jiwa pada Agustus 2019 menjadi 1.575,7 ribu jiwa pada Agustus 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan yaitu pada Agustus 2019 penduduk bekerja berjumlah 1.466,04 ribu jiwa meningkat menjadi 1.516,3 ribu jiwa pada Agustus 2020. Kegiatan produksi yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah tenaga kerja pada Agustus 2020. Jika dibandingkan dengan 2 tahun kebelakang polanya juga masih sama baik untuk penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan penduduk bekerja yang meningkat jumlahnya.

Gambar 2 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas), Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Sulawesi Tengah, Agustus 2018 - Agustus 2020 (Ribu Jiwa)

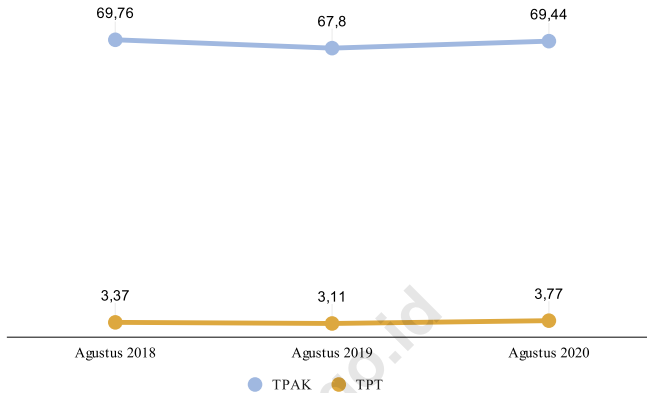


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat seiring naiknya jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2019 TPAK sebesar 67,80 persen meningkat menjadi 69,44 persen pada Agustus 2020. Pada tahun 2020 peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan, dari 3,11 persen pada Agustus 2019 naik menjadi 3,77 persen pada Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab naiknya TPT pada Agustus 2020 adalah pada bulan Maret - Agustus 2020 di beberapa daerah di Sulawesi Tengah penduduk sedang menghadapi pandemi virus Covid-19 sehingga berbagai kegiatan perekonomian dan akhirnya berdampak pada meningkatnya jumlah penganggur. Walaupun berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani masalah pandemi ini, namun masih belum efektif dalam meningkatkan kembali kegiatan perekonomian khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dibandingkan dengan Agustus 2018, TPT juga masih lebih tinggi pada Tahun 2020, Hal serupa terjadi juga pada TPAK.

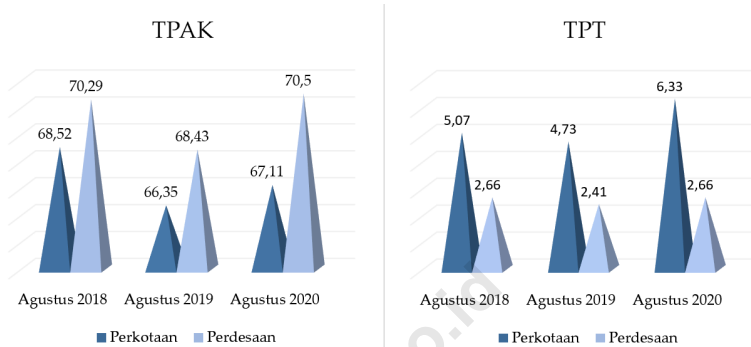
Gambar 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah, Agustus 2018 - Agustus 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar banyak tinggal di daerah pedesaan, sehingga merupakan hal yang wajar jika penduduk usia kerja dan angkatan kerja di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini juga mempengaruhi TPAC di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Berbeda halnya dengan TPAC, TPT di pedesaan lebih rendah dibanding di perkotaan. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk di pedesaan bergerak di sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti saat Agustus 2020 sedang adanya musim panen tanaman padi dan juga perkebunan sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Gambar 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah Menurut Tempat Tinggal, Agustus 2018 - Agustus 2020



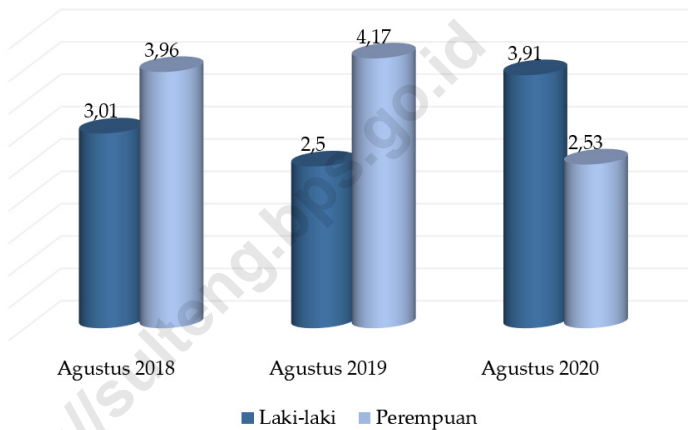
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Bias gender masih sangat terlihat pada bidang ketenagakerjaan. Perempuan yang aktif secara ekonomi masih sangat sedikit jumlahnya dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari TPAK perempuan yang sebesar 52,50 persen, lebih sedikit dari TPAK laki-laki yang sebesar 85,82 persen pada Agustus 2020. Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah menjadikan laki-laki lebih aktif secara ekonomi dibanding perempuan.

Selama kurun waktu satu tahun (Agustus 2019 - Agustus 2020), TPT perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPT laki-laki. Pada Agustus 2020 TPT perempuan turun dari 4,17 pada Agustus 2019 menjadi 3,52 pada Agustus 2020, Pola perubahan TPT perempuan berbanding terbalik dengan TPT laki-laki yang mengalami kenaikan dari 2,50 pada Agustus 2019 menjadi 3,91 pada Agustus 2020. Dalam

rangka mendukung kesetaraan gender, pemberian kesempatan kerja bagi perempuan harusnya diperlebar dibandingkan dengan laki-laki, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, karena banyak pula pekerjaan yang identik dengan laki-laki tetapi dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan.

Gambar 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Sulawesi Tengah Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2018 - Agustus 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

3.4. Pendidikan

Kondisi sumber daya manusia di bidang pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya. Sebagai contoh semakin lama penduduk/anggota masyarakat menuntut ilmu/sekolah, semakin tinggi pemahamannya akan unsur kehidupan yang ada, sehingga diharapkan semakin arif dan bijaksana mereka hidup antar sesama. Dengan asumsi bahwa semakin lama penduduk suatu wilayah memperoleh pendidikan/bersekolah, ketahanan wilayah/sosialnya relatif semakin baik, maka indikator pendidikan yang dianggap relevan dengan ketahanan sosial adalah Angka Partisipasi Sekolah, baik itu Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM), kemudian Angka Buta Huruf, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

Indikator partisipasi sekolah termasuk dalam indikator proses yang dalam pembahasan disini diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-6, 7-12, 13-15, dan 16-18 Tahun, 2020

Kabupaten/Kota	APS	APS	APS	APS
	5-6	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	29,09	98,61	91,83	72,56
2. Banggai	24,87	99,11	94,04	71,85
3. Morowali	17,12	98,84	94,97	88,24
4. Poso	24,64	99,45	95,34	82,00
5. Donggala	50,93	98,01	93,18	70,98
6. Toli Toli	6,20	99,23	87,51	75,68
7. Buol	21,90	99,53	93,27	71,44
8. Parigi Moutong	17,25	96,94	91,13	66,95
9. Tojo Una Una	13,53	99,37	95,19	71,58
10. Sigi	26,88	97,53	92,33	73,49
11. Banggai Laut	19,87	99,08	91,27	72,65
12. Morowali Utara	18,58	96,85	96,43	79,23
13. Palu	32,19	98,56	95,54	86,63
Sulawesi Tengah	23,69	98,38	93,13	75,29

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 6 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun,
2020

Kabupaten/Kota	APM	APM	APM
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	98,06	67,86	60,87
2. Banggai	93,69	73,74	63,94
3. Morowali	94,72	73,49	67,54
4. Poso	93,89	79,19	68,16
5. Donggala	93,38	77,51	60,45
6. Toli Toli	91,68	63,42	56,76
7. Buol	96,66	75,26	62,14
8. Parigi Moutong	90,75	72,71	66,32
9. Tojo Una Una	98,94	70,91	63,33
10. Sigi	93,10	75,20	57,82
11. Banggai Laut	86,16	71,46	60,55
12. Morowali Utara	91,05	84,35	70,29
13. Palu	92,50	78,71	74,94
Sulawesi Tengah	93,24	74,42	65,02

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 7 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	3 119	337 411	30 149	11,19
SMP/MTS	1 133	166 246	15 809	10,52
SMA/SMK/MA	575	145 495	11 914	12,21

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Secara umum, ketahanan sosial masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah di bidang pendidikan relatif baik. Rasio Murid Guru di Provinsi Sulawesi Tengah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 11,19 yang berarti satu orang guru rata-rata mengajar 11-12 murid, sedangkan tingkat SMP/MTs secara rata-rata seorang guru menangani 10-11 murid dan tingkat SMA/SMK/MA secara rata-rata seorang guru menangani 12-13 murid.

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2020 persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas telah mencapai 58,11 persen, meningkat bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2019 sebesar 57,07 persen. Indikator ini juga sering digunakan

dalam menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia yang didekati dengan rata-rata lama sekolah.

Tabel 8 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD/MI/	SMP/ MTs/	SMA/ MA/
		SDLB/ Paket A	SMPLB/ Paket B	SMLB/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	7,52	40,31	20,07	19,16
2. Banggai	11,50	27,99	24,66	22,57
3. Morowali	7,85	34,20	18,66	25,48
4. Poso	8,45	30,20	20,47	25,13
5. Donggala	10,00	38,60	24,92	17,14
6. Toli Toli	11,41	34,24	20,82	21,48
7. Buol	13,68	31,75	20,86	20,05
8. Parigi Moutong	17,13	36,23	22,97	14,54
9. Tojo Una Una	12,17	38,98	19,52	18,69
10. Sigi	8,27	36,03	21,56	25,26
11. Banggai Laut	9,21	38,11	20,03	20,56
12. Morowali Utara	10,50	32,15	20,60	24,16
13. Palu	3,28	13,26	28,96	29,42
Sulawesi Tengah	12,41	29,47	22,95	21,73

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 8 (lanjutan)

Kabupaten/Kota	SMK/ MAK	Diploma 1/2/3	Diploma 4/ S1/S3/ S4	Total
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Banggai Kepulauan	1,59	1,94	9,42	100,00
2. Banggai	2,26	1,68	9,34	100,00
3. Morowali	1,26	1,76	10,79	100,00
4. Poso	3,20	1,95	10,60	100,00
5. Donggala	3,20	1,40	4,74	100,00
6. Toli Toli	2,21	1,41	8,43	100,00
7. Buol	2,99	3,15	7,51	100,00
8. Parigi Moutong	1,83	1,61	5,68	100,00
9. Tojo Una Una	2,90	2,13	5,60	100,00
10. Sigi	1,03	1,89	5,96	100,00
11. Banggai Laut	1,81	0,75	9,52	100,00
12. Morowali Utara	3,04	1,21	8,34	100,00
13. Palu	3,86	2,19	19,03	100,00
Sulawesi Tengah	2,50	1,80	9,13	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

3.5. Kesehatan

Kondisi sumber daya manusia di bidang kesehatan juga ikut andil dalam melihat kondisi ketahanan wilayah/sosial penduduk di suatu wilayah tertentu. Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Kondisi kesehatan yang dalam hal ini diwakili dengan indikator angka kesakitan merupakan resultan dari berbagai aspek/kondisi yang dirasakan/dialami oleh masyarakatnya secara umum, yang dengan demikian dapat menjadi salah satu indikator yang baik untuk menggambarkan kondisi ketahanan wilayah/sosialnya.

Kesehatan merupakan salah satu komponen yang dapat mengukur kualitas hidup manusia. Semakin baik tingkat kesehatan manusia maka akan semakin baik pula kualitas hidupnya. Salah satu wujud keberhasilan pembangunan bidang kesehatan yaitu ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan berada dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, dan memiliki tingkat kesehatan yang baik.

Tabel 9 Beberapa Indikator Kesehatan & Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019 – 2020

Indikator Kesehatan dan Lingkungan	Tahun	
	2019 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan	32,32	26,16
Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	18,48	16,75
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Tidak Bersih	25,33	24,62
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah dengan Lantai Terluas Tanah	2,22	2,21

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah setidaknya terdapat 26,16 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya dengan nilai 32,32 persen. Pada Tahun 2020 status kesehatan penduduk tergambar dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan yang mencapai 26,16 persen di Tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 26 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pernah mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan

tersebut meliputi beberapa penyakit antara lain: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lainnya.

Tabel 10 Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan,
2019-2020

Jenis Kelamin	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	30,56%	24,93%
Perempuan	34,16%	27,45%
Laki-laki + Perempuan	32,32%	26,16%

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

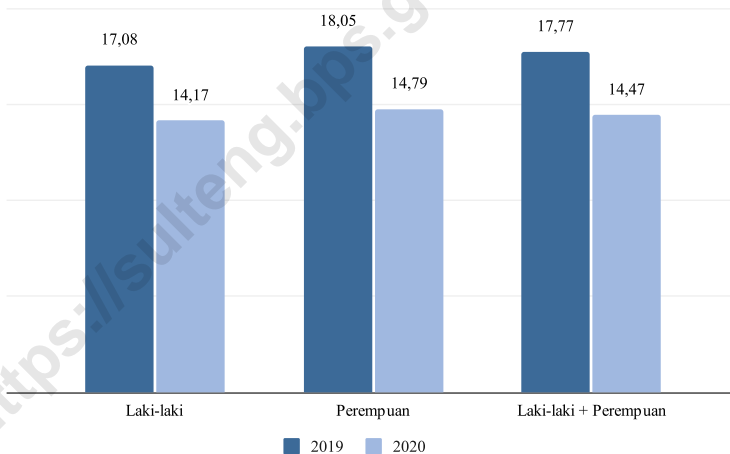
Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan di tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan untuk Penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebesar 6,71% lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 5,63%

Banyak hal dapat dilihat untuk dapat mengetahui tingkat kesehatan di suatu wilayah, salah satunya yaitu dengan morbiditas. Morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan belum tentu terganggu aktifitas sehari-

harinya.

Di tahun 2019 angka morbiditas laki laki sekitar 17,08 persen dan 18,50 persen untuk perempuan. Sedangkan di tahun 2020, angka morbiditas untuk laki laki sekitar 14,17 persen dan 14,79 persen untuk perempuan. Terjadi penurunan angka morbiditas pada kelompok laki-laki dari tahun sebelumnya, sehingga secara total, angka morbiditas di Tahun 2020 secara umum lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 6 Angka Morbiditas Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan bidang kesehatan selain dari faktor lingkungan, hal lain juga perlu diperhatikan adalah fasilitas dan sarana kesehatan. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar

adil dan merata.

Di Sulawesi Tengah hingga tahun 2020, seluruh kabupaten/kota sudah memiliki fasilitas rumah sakit. Jumlah rumah sakit umum di Sulawesi Tengah sebanyak 40 unit. Selain rumah sakit umum dan rumah bersalin, terdapat pula puskesmas, klinik dan posyandu untuk menjangkau masyarakat di level kecamatan dan desa. Di Sulawesi Tengah, jumlah puskesmas sebanyak 219 unit. Dengan jumlah kecamatan yang sebanyak 175 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan sudah terdapat minimal satu puskesmas. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 3.345 unit dan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 2.020, berarti setidaknya terdapat minimal satu posyandu di masing-masing desa/kelurahan. Ketersediaan fasilitas kesehatan posyandu ini tentu saja akan membantu menjangkau masyarakat hingga level desa. Dengan demikian, diharapkan akses terhadap fasilitas kesehatan ini semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah.

Tabel 11 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Jenis Fasilitas Kesehatan	2020
(1)	(2)
Rumah Sakit Umum	40
Rumah Bersalin	4
Puskesmas	219
Posyandu	3 345

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan juga harus didukung oleh tenaga medis yang memadai. Di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 jumlah dokter sebanyak 1.105 orang, perawat 6.723 orang, dan bidan 6.205 orang. Selanjutnya, jumlah tenaga farmasi sebanyak 1.275 orang, dan ahli gizi sebanyak 548 orang. Jumlah tenaga medis ini mengalami penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah tenaga medis ini diharapkan terus dilakukan mengingat jumlah penduduk juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan akan tenaga medis juga akan semakin bertambah.

Tabel 12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019 – 2020

Jumlah Tenaga Kesehatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Dokter	1 079	1 105
Perawat	6 345	8 723
Bidan	4 724	6 205
Farmasi	1 012	1 275
Ahli Gizi	384	548

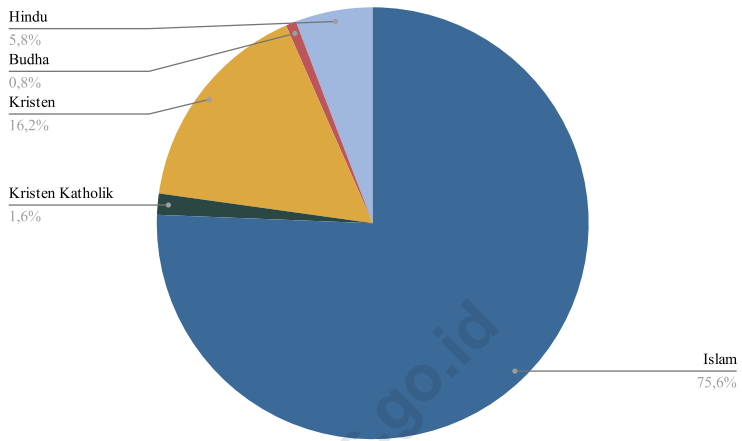
Sumber: Kementerian Kesehatan, <http://sisdmk.kemkes.go.id>

3.6. Sosial Budaya

Dalam kurun waktu sejarah telah tercatat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah mampu berkembang sebagai transformasi budaya, baik yang bersifat religi, tradisi, teknologi maupun aspirasi yang semuanya itu merupakan daya penggerak yang sangat besar nilainya dalam memberi corak serta memperkaya kebudayaan, kepribadian dan kebanggaan daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketahanan wilayah/ sosial masyarakatnya. Nilai-nilai agama yang universal dan abadi sifatnya merupakan salah satu aspek bagi kehidupan dan kebudayaan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki iklim yang kondusif bagi perkembangan berbagai ragam agama, khususnya dalam hal toleransi antar umat beragama.

Dari berbagai agama yang ada, data Kementerian Agama menunjukkan sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tengah memeluk Agama Islam 2.352.152 penduduk atau 75,62 persen, kemudian yang memeluk Agama Kristen Katholik sebesar 49.160 orang atau 1,58 persen, Agama Kristen Protestan sebesar 504.418 orang atau 16,22 persen, Agama Budha sebanyak 24.254 orang atau 0,78 persen dan pemeluk Agama Hindu sebesar 180.388 orang atau 5,80 persen. Keberagaman ini diakomodir dengan penyediaan fasilitas tempat ibadah dimana jumlah masjid di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 3.703 unit. Sedangkan untuk jumlah gereja Kristen sebanyak 2.199 unit dan gereja katolik sebanyak 181 unit untuk vihara/klenteng/pura ada sebanyak 256 unit.

Gambar 7 Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020



Sumber : Kemenag 2020

BAB 4

STATISTIK KETAHANAN EKONOMI

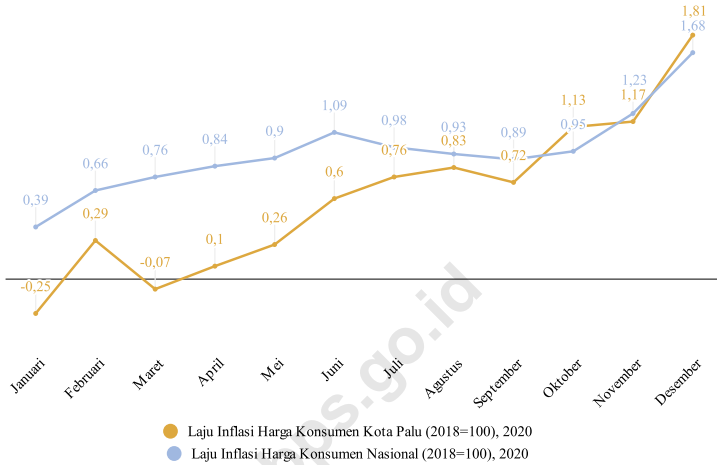
Kondisi perekonomian sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakat yang ada didalamnya. Kondisi perekonomian yang dimaksud adalah kondisi yang mencerminkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta kemiskinan. Keempat hal tersebut dimanifestasikan dengan beberapa indikator yang relevan, diantaranya untuk stabilitas ekonomi diwakili dengan angka inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk didalamnya pendapatan perkapita dan jumlah rumah tangga miskin yang mencerminkan ketahanan sosial dari masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

4.1. Inflasi

Tingkat inflasi merupakan sisi lain untuk melihat kondisi perekonomian. Perubahan harga yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan stabilitas ekonomi suatu wilayah. Tingkat inflasi yang tinggi dan tak terkendali akan merugikan perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan ekonomi bagi rakyat secara keseluruhan, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap

kondisi ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya.

Gambar 8 Laju Inflasi per Bulan Nasional dan Kota Palu (2018=100), 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2020 Kota Palu secara umum lebih rendah apabila dibandingkan angka inflasi nasional, tercatat 1,81 persen untuk Kota Palu dan 1,68 persen untuk angka inflasi nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, inflasi Kota Palu tahun 2020 lebih rendah dengan inflasi tahun 2019 sebesar 2,30 persen, akan tetapi untuk inflasi nasional tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019, inflasi nasional 2019 adalah sebesar 2,72 persen.

Selama tahun 2020 inflasi tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 1,17 persen dan 1,81 persen. Sedangkan

di bulan Januari dan bulan Maret Kota Palu mengalami deflasi sebesar 0,25 di bulan Januari dan 0,07 di bulan Maret. Secara umum dalam hal kestabilan harga Kota Palu bisa dikatakan cukup baik, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap stabilitas perekonomian yang tentu saja berpengaruh terhadap ketahanan sosial dari masyarakatnya.

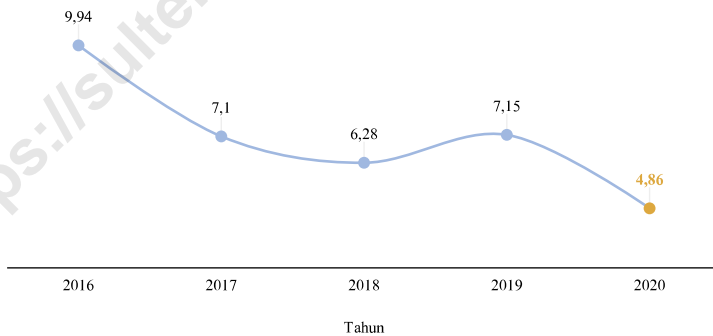
4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan demikian arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Neraca ekonomi regional bertujuan memberikan suatu gambaran statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perangkat pokok dalam neraca ekonomi regional. Secara lebih kongkret neraca ekonomi regional pada umumnya berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi yang dapat diukur atau dinilai dalam bentuk uang, antara lain mengenai tingkat produksi, nilai tambah dan agregat ekonomi makro lainnya yang memperoleh hasil

kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan yang nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan tingkat harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan secara nyata pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu PDRB diestimasi dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan (tahun 2010). Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan perekonomian setiap tahun atau selama periode tertentu.

Gambar 9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada gambar diatas, terlihat sampai dengan tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya penurunan dari 9,94 persen di tahun 2016 menjadi 4,86 persen di tahun 2020, tahun 2020 terjadi pelemahan yaitu sebesar 4,86 persen. Satu-satunya peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 20,60 persen.

<https://sulteng.bps.go.id>

Tabel 13 Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi
Sulawesi Tengah, 2019-2020

Kategori	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,20	21,76	23,45	22,06
B	Pertambangan dan Penggalian	13,38	13,40	15,61	16,43
C	Industri Pengolahan	22,42	27,61	23,05	27,18
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air	0,10	0,10	0,11	0,10
F	Konstruksi	11,32	10,14	10,03	8,76
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	7,87	7,08	7,24	6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	3,53	2,26	3,22	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45	0,38	0,41	0,35
J	Informasi dan Komunikasi	3,05	3,07	3,49	3,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	1,87	1,75	1,83
L	Real Estate	1,51	1,45	1,48	1,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,21	0,20	0,20	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,79	5,55	5,04	4,82
P	Jasa Pendidikan	3,31	3,10	3,04	2,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,31	1,20	1,22
R,S,T	Jasa lainnya	0,73	0,69	0,65	0,62
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambaran lebih jauh struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat berdasarkan dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, Sektor Primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor yang memiliki kontribusi terkecil pada PDRB Sulawesi Tengah adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas, Air dan Jasa Lainnya.

4.3. PDRB

Apabila angka PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun diperoleh rata-rata produk yang dihasilkan atau pendapatan yang dibayarkan setiap penduduk daerah tersebut, Rata-rata ini disebut sebagai PDRB kapita, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, Bila pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.41.110.000 kemudian pada Tahun 2020 telah mencapai Rp.64.070.000,- berarti telah terjadi peningkatan sekitar 45% dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.

Tabel 14 PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2020

Tahun	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2016	41,11	31,17
2017	45,24	32,92
2018	55,68	39,16
2019	61,06	42,06
2020	64,07	43,53

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Memang disadari bahwa pendapatan perkapita belum mencerminkan pendapat penduduk yang sebenarnya, karena hanya menunjukkan kemampuan ekonomi daerah, selain itu juga belum dapat mencerminkan pemerataan pendapatan penduduk, Namun secara makro indikator ini masih bisa menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang erat kaitannya dengan pola atau kekuatan dari ketahanan wilayah/sosial masyarakat.

4.4. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan kemiskinan makro dan kemiskinan mikro.

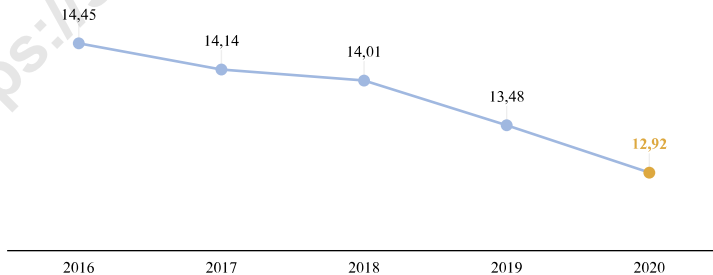
Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi dan tidak menunjukkan siapa dan dimana posisi penduduk miskin tersebut, Secara makro jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ada sebanyak 398.730 jiwa atau sebanyak 12,92 persen dari seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, Selain persentase kemiskinan, BPS juga mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*

Index-P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Adapun garis kemiskinan tahun 2020 adalah sebesar Rp.483.662,-/kapita/bulan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 2,78 dan Indeks Kearifan Kemiskinan sebesar 0,87.

Gambar 10 Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2020



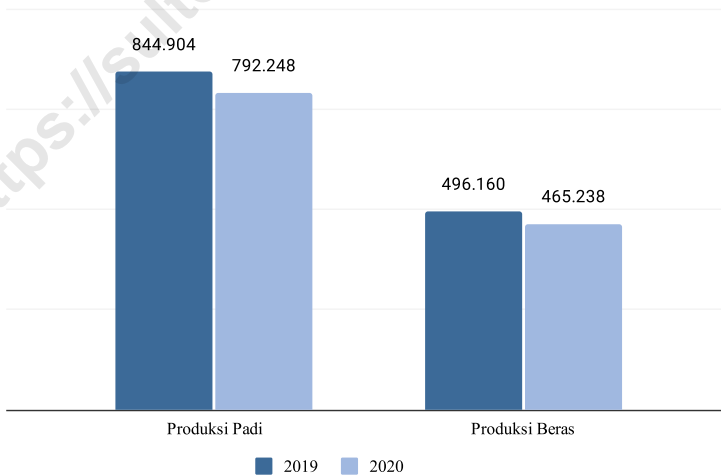
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

4.5. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan juga menjadi salah satu indikator yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pangan dan konsumsi masyarakatnya, Provinsi Sulawesi Tengah berkepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya

Produksi padi tahun 2020 sebesar 792 ribu ton padi lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 844 ribu ton padi. Hal tersebut pastinya berimbas pada produksi beras yang menurun dari 496 ribu ton di tahun 2019 menjadi 465 ribu ton di tahun 2020.

Gambar 11 Produksi Padi dan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

BAB 5

STATISTIK KETAHANAN POLITIK DAN KEAMANAN

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan atau potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Perkembangan kondisi politik khususnya sejak reformasi sangat pesat perkembangannya, dan berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya, Dalam bagian ini akan diuraikan secara singkat kondisi ketahanan sosial di bidang politik dan keamanan meliputi kondisi politik, hukum, dan keamanan dan ketertiban.

5.1. Politik

Perkembangan politik dewasa ini semakin cepat melebihi perkembangan ekonomi maupun perkembangan penduduk, Disadari bahwa sejak bergulirnya proses reformasi, kondisi perpolitikan di tanah air mengalami revolusi baik dari sisi ideologi, organisasi politik maupun proses demokrasi, Kondisi ini menjadi latar belakang untuk mulai dikembangkan statistik politik yang sementara ini berpatokan pada tiga pilar utama sumber data statistik dasar bidang politik. Pilar pertama adalah rakyat/penduduk Warga Negara Indonesia, kaitannya

dengan keragaman suku, bahasa, agama dan budaya, penduduk yang punya hak pilih, penduduk yang tidak punya hak pilih, penduduk yang tidak tercatat dan lain-lain. Pilar kedua adalah partai politik itu sendiri dilihat dari jumlah partai politik, banyaknya kantor cabang, banyaknya pengurus, banyaknya anggota, program kerja partai dan lain-lain. Pilar ketiga adalah pemilihan umum, pemilihan kepala daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, Data yang dikumpulkan mulai dari jumlah perolehan suara, anggota legislatif, jumlah suara, jumlah kursi dan lain-lain.

Pada tahun 2020 jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 45 orang, terdiri dari 33 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, Berikut disajikan Tabel Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Tabel 15 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Partai	Jumlah Perolehan	
	Suara	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)
1. Partai Nasional Demokrat	120 754	5
2. Partai Kebangkitan Bangsa	98 790	3
3. Partai Keadilan Sejahtera	95 136	3
4. Partai PDIP	140 977	6
5. Partai Golongan Karya	248 501	7
6. Partai Gerakan Indonesia Raya	187 031	6
7. Partai Demokrat	158 155	6
8. Partai Amanat Nasional	106 488	3
9. Partai Persatuan Pembangunan	74 727	1
10. Partai Hati Nurani Rakyat	105 799	4
11. Partai Bulan Bintang	46 498	1
12. Partai Keadilan dan Persatuan	51 967	0
Sulawesi Tengah	1 434 823	45

Sumber : KPUD

5.2. Keamanan dan Ketertiban

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah, Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun dimana kasus kejahatan sebanyak 19.252 kasus di tahun 2018, 15.620 kasus di tahun 2019 dan 11.859 kasus di tahun 2020, demikian pula dengan jumlah kejahatan yang terselesaikan sejumlah 10.467 kasus di tahun 2019 atau 67,01 persen di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 jumlah kejahatan yang terselesaikan sebesar 7.287 kasus atau 61,45 persen.

Tabel 16 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Jumlah Kejahatan yang terselesaikan (*Crime Cleared*) di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019-2020

Wilayah	Jumlah Kejahatan			
	2019		2020	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	398	227	375	224
2. Banggai	1 361	772	1 198	768
3. Morowali	607	297	310	163
4. Poso	656	395	122	86
5. Donggala	505	298	571	254
6. Tolitoli	282	180	211	113
7. Buol	567	329	511	322
8. Parigi Moutong	532	243	480	286
9. Tojo Una-una	289	200	172	150
10. Sigi	846	482	585	114
11. Banggai Laut*	-	-	-	-
12. Morowali Utara	607	387	185	110
13. Palu	1 589	1 038	1 691	1031
14. Sulawesi Tengah	7 381	5 619	5 448	3 666

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Apabila diuraikan berdasarkan jenis kejahatan, jumlah kasus yang paling banyak terjadi adalah Pencurian dengan pemberatan (3.330 kasus) dan Penganiayaan Ringan sebanyak 2.165 kasus.

Tabel 17 Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kejadian
(1)	(2)
1. Pencurian	2 331
2. Penganiayaan Ringan	1 591
3. Pencurian Kendaraan Bermotor	1 099
4. Penipuan/Perbuatan Curang	659
5. Penggelapan	630
6. Narkotika dan Psikotropika	611
7. Pencurian Dengan Pemberatan	572
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	471
9. Pencurian Dengan Kekerasan	263
10. Pencabulan	235

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No.48 Palu 94114
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
Wevsite: <http://sulteng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id

ISBN 978-623-5826-00-4 (PDF)

